

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdullah, Aceng, 2000, *Press Relation : Kiat-Kiat Berhubungan dengan Pers*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Adjie, Oemar, 1997, *Pers, Aspek-Aspek Hukum*, Erlangga, Surabaya.
- Adjie, Omar Seno, 1991, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Profesi Wartawan*, Erlangga, Jakarta.
- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmadi, Tjuk, 1993, *Sistem Pers Indonesia dan Pembangunan Nasional*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Bachtiar, Da'i, 2004, "Kebebasan Pers Vs Delik Pers", dalam *Dialog Pers dan Hukum*, Dewan Pers Indonesia, Jakarta.
- Bammelen, Mr. J.M. Van, 1986, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung.
- Budiardjo, Miriam, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budyatna, Moch, 1994, "Analisa Dan Evaluasi Hukum Tertulis Tentang Asas Kebebasan Pers Yang Bertanggung Jawab", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, S.H., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Djuroto, Totok, 2004, *Manajemen Penerbitan Pers*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Djarmika, Prija, 2006, *Strategi Sukses Berhubungan dengan Pers dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jawa Post Group, Surabaya.
- Effendy, Onong Uchana, 2002, *Dinamika Komunikasi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Girsang, Juniver, 2007, *Penyelesaian Sengketa Pers*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Hiariej, Eddy O.S., 2007, *Pemikiran Remmelink Mengenai Asas Legalitas*, Jentera Jurnal Hukum, Edisi 16 tahun IV, April-Juni 2007.
- _____, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- _____, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Junaidhie, Kurniawan, 1991, *Ensiklopedi Pers Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lesmana, Tjipta, 2005, *Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Pers*, Erwin-Rikka Pers, Jakarta.
- Mahadi, 1989, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahfud. M.D, Moh, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Makarim, Nono Anwar, 2004, *Kebebasan Pers & Hukum*, Dewan Pers Indonesia, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden, 1997, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya dilengkapi dengan Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muis, A, 1999, *Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa Menjakau Era Cybercommunication Milenium Ketiga*, PT Dharu Anuttama, Jakarta.
- Panjaitan, Hinca I.P, 2003, “*Gunakan Hak Jawab, Hak Koreksi & Kewajiban Koreksi Anda, Ombudsman Memfasilitasinya*”, JP Press, Jakarta.
- _____, 2004, *Mengoptimalkan Peran Dewan Pers*, Dewan Pers Indonesia, Jakarta.
- Panjaitan, Hinca I.P, dan Siregar, Amir Efendi, 2004, *1001 Alasan Undang-Undang Pers Lex Specialis*, Penerbit SPS, Jakarta.

- Poernomo, Bambang, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rachmadi, F, 1990, *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*, PT Gramedia, Jakarta.
- Sadono, Bambang, 1993, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Siebert, Fred. S., Theodore Peterson, Wilbur Schramm, 1956, *Four Theories of the Press*, University of Illinois, Chicago, (Terjemahan PT Intermedia, Jakarta).
- _____, 1986, *Empat Teori Pers*, PT Intermedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soesilo, R, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sumadira, Haris, 2005, *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Sundoro, 1985, *Kebebasan Pers Salah Satu Realisasi Kebebasan Masyarakat Mencapai Kebebasan Berekspresi*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Supradjaja, Komariah Emong, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, Penerbit Alumni Bandung.
- Surachmin, dan Suhandi Cahaya, 2005, *101 Asas dan Prinsip Hukum*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Soerodibroto, R. Soenarto, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahidin, Samsul, 2006, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

_____, 2012, *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.

C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Jakarta

Kamus Hukum, 2009, PT Rineka Cipta, Jakarta.

D. Penelitian Hukum

Oly Viana Agustine dan Zubet Rizal, 2010, *Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Sarana Terakhir (Ultimum Remedium)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

E. Majalah

Harmoko, 11 Maret 1983, *Masalah Kebebasan Pers dalam Sistem Pers Pancasila*. Makalah pada Panel Diskusi yang diselenggarakan memperingati ulang tahun X Majalah TEMPO, Jakarta.

F. Internet

<http://www.murianews.com/opini-3/item/5537-benarkah-uupers-lex-specialis.html>, diakses pada tanggal 2 April 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10947/ilex-specialisikah-undangundang-pers-dari-kuhp>, diakses pada tanggal 10 Mei 2015.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9064/tarman-azzam-undangundang-pers-tidak-bisa-menjadi-ilex-specialis>, diakses pada tanggal 10 Mei 2015.

<http://www.heritage.org/issues/legal/overcriminalization>, diakses pada tanggal 9 Juni 2015.